

ABSTRAK

Pemerintah terus mendorong sistem pembayaran belanja negara ke arah non tunai. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaannya lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Kartu Kredit Pemerintah merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat dan melakukan modernisasi pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penggunaan Kartu kredit pemerintah di wilayah pembayaran KPPN Kediri beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, dengan menggunakan model implementasi berdasarkan teori Edward III, dimana implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di kota Kediri yang merupakan wilayah pembayaran KPPN Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah pembayaran KPPN Kediri relatif baik. Komunikasi kebijakan telah ditransmisikan dengan tepat, akurat dan konsisten oleh pihak – pihak yang terlibat. Sumber Daya pada KPPN Kediri, Satuan Kerja A, Satuan Kerja B dan Satuan Kerja C telah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Disposisi berupa kecenderungan sikap dan komitmen dari pihak – pihak yang terlibat sangat mendukung implementasi kebijakan, serta Struktur Birokrasi kondusif terhadap implementasi kebijakan dengan adanya kerjasama di antara pihak – pihak yang terlibat 2) Faktor yang mendukung implementasi adalah pemberian *reward* bagi satuan kerja dengan frekwensi dan nilai transaksi yang tinggi dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, adanya ketentuan perpajakan yang mengatur kemudahan bagi bendahara dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan Implementasi *marketplace* pemerintah yang mendukung *digital payment*, Adapun faktor yang menghambat implementasi adalah keterbatasan infrastruktur *Electronic Data Capture* (EDC) terutama pada penyedia - penyedia kecil yang menjadi rekanan pemerintah dan masih terdapat penyedia yang mengenakan tambahan biaya atas transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Kredit Pemerintah

ABSTRACT

The government continues to push the state spending payment system towards non-cash. The goal is to make the implementation more professional, open, effective, efficient, and responsible while paying attention to the principles of good state financial management. Government Credit Card is a government policy in order to accelerate and modernize the implementation of the budget. This study aims to describe and analyze the implementation of government credit card usage policy in the payment area of KPPN Kediri along with factors that support and hinder its implementation, using an implementation model based on Edward III theory, where the implementation of public policy is influenced by four variables: communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The research method used is qualitative method with case study approach. Data collection techniques from interviews, observations and document studies. The research was conducted in the city of Kediri which is the payment area of KPPN Kediri.

The results of the study show that: 1) The implementation of the use of Government Credit Cards in the Kediri KPPN payment area is relatively good. Policy communication has been transmitted appropriately, accurately and consistently by the parties involved. The resources at KPPN Kediri, Working Unit A, Working Unit B and Working Unit C are sufficient to implement the policy effectively. Disposition in the form of a tendency of attitude and commitment from the parties involved strongly supports the implementation of the policy, and the Bureaucratic Structure is conducive to the implementation of the policy with the cooperation between the parties involved. 2) Factors that support implementation are the provision of rewards for the working unit with high frequency and transaction value in using Government Credit Cards, the existence of tax provisions that regulate the convenience of treasurers in using Government Credit Cards and Implementation of government marketplaces that support digital payments. Hindering implementation is the limitation of Electronic Data Capture (EDC) infrastructure, especially for small providers who are partners with the government and there are still providers who charge additional fees for transactions using Government Credit Cards.

Keywords: Policy Implementation, Government Credit Card